

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 pasal 10 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif.

Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan pemerintah daerah dalam mengelola daerah tersebut. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya melalui pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi dan menyangkut upaya dalam mendapatkan uang maupun membelanjakannya, sehingga

masalah yang timbul dalam keuangan daerah bagaimana sumber pendapatan itu digali dan didistribusikan.¹

Dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan daerah menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Berbagai upaya yang telah pemerintah daerah lakukan dalam kegiatan ekonomi akan menghasilkan sejumlah pendapatan yang dapat menambah nilai kekayaan daerah. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah.²

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah³ yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah Semua penerimaan kas

¹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 45

² Erlina, dkk, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 109

³ *Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah* (Bandung: Citra Umbara, 2010)

daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

Pendapatan Daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan dan mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu menumbuh kembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan. Pendapatan daerah dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu:⁴

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Penerimaan yang sah

Keuangan daerah tidak hanya berupa pendapatan, melainkan ada pengeluaran daerah yang rutin dilakukan oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah didalam setiap kegiatan perekonomian terwujud dalam berbagai pembelanjaan. Pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastrutur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggaran pertahanan dan keamanan merupakan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan teori pengeluaran pemerintah yang menjelaskan bahwa pembelanjaan pemerintah terhadap berbagai kegiatan pembangunan akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara⁵ maka jika

⁴ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) , 94.

⁵ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi...*168

dikaitkan dengan pembelanjaan pemerintah daerah yang tercermin dalam realisasi belanja APBD, semakin besar belanja pemerintah daerah maka semakin besar juga dampaknya terhadap perekonomian daerah.⁶

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah di Indonesia maka perencanaan keuangan di daerah harus direncanakan dengan baik. Penentuan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun sangat menentukan keberhasilan ekonomi suatu daerah. Realisasi APBD yang merupakan representasi pengeluaran pemerintah daerah akan memberikan dampak terhadap kinerja perekonomian di daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Kabupaten Serang yang telah berumur 490 tahun dalam perkembangannya sebagai daerah otonomi telah melakukan berbagai terobosan pembangunan. Sebagai daerah yang memiliki wilayah yang strategis untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam perencanaan pembangunan ekonomi di wilayah Serang diperlukan pertimbangan yang matang. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah sudah seharusnya memberi pengaruh yang positif terhadap perekonomian wilayah Kabupaten Serang.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan pemerintah daerah dituntut untuk lebih

⁶ Suparmo'ko, *Pengantar Ekonomika Makro* (Yogyakarta: BPFE, 2000), 20

mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan.

Pendapatan daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi produktif daerah. Upaya untuk menaikan pendapatan dapat dilakukan dengan mengembangkan dan mengoptimalkan potensi daerah dalam berbagai sektor. Demikian juga dengan belanja daerah atau pengeluaran pemerintah akan meningkat seiring dengan peningkatan perekonomian suatu daerah. Meskipun demikian peningkatan pengeluaran pemerintah belum tentu berakibat baik terhadap aktivitas perekonomian. Oleh karena itu perlu dilihat efisiensi penggunaan pengeluaran pemerintah tersebut.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SERANG”

B. Identifikasi Masalah

Kabupaten Serang telah berusia 490 tahun, berbagai permasalahan masih mengemuka dan belum teratasi.

⁷ Suparmoko, *Pengantar Ekonomika Makro*...22

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain: kemiskinan, potensi daerah yang tidak dikelola dengan baik, buruknya infrastruktur jalan, rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan yang memprihatinkan.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas dan lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yakni berupa potensi daerah yang belum dikelola dengan baik dan pengeluaran yang tidak efisien terbukti dengan fluktuasinya nilai pendapatan dan belanja daerah. Pembatasan juga dilakukan pada periode data yakni mulai dari tahun 2014-2016 yang disajikan dalam bentuk data bulanan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Serang?
2. Bagaimana pengaruh Belanja daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Serang?
3. Berapa besar pengaruh pendapatan daerah dan belanja daerah terhadap Produk Domestik Bruto Kabupaten Serang?
4. Bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang keuangan pemerintah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dan ingin dicapai dalam penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pendapatan daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh belanja daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan dan belanja daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
4. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam tentang pendapatan dan belanja pemerintah

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan dan daya guna bagi pihak-pihak terkait, yakni sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penulisan ini dapat memperluas dan memperkaya wawasan dalam teori maupun praktek. Kemudian untuk membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh.

b. Bagi Akademik

Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan demi meningkatkan kompetensi diri, kecerdasan intelektual dan memperkaya bahan kajian pustaka bagi peminat studi Ekonomi.

c. Bagi Pemerintah

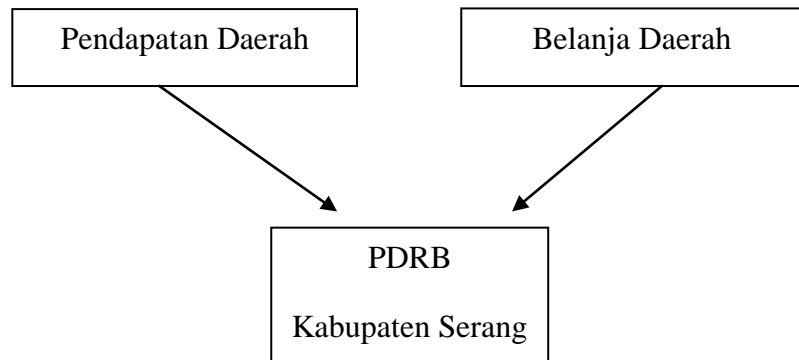
Menambah wawasan bagi pemerintah mengenai keuangan daerah berupa pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan yang optimal dan belanja daerah yang efisien akan mempengaruhi kondisi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir ilmiah seperti yang tertera dalam skema berikut :

Skema 1

Kerangka Berpikir



Dalam skema tersebut terdapat dua variabel bebas yakni pendapatan daerah dan belanja daerah. Kedua komponen tersebut akan diteliti mengenai pengaruh terhadap variabel terikat berupa PDRB Kabupaten Serang.

Secara ringkas kerangka pemikiran dalam penelitian ini ialah Pembangunan daerah dengan sistem otonomi daerah ditujukan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi (PDRB). Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dengan peningkatan nilai PDRB, dibutuhkan sumber dana maupun sumber daya manusia serta pengelolaan keuangan yang baik untuk mencapai hal itu. Kedua aspek berupa pendapatan dan belanja daerah diharapkan menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya suatu perekonomian di daerah tersebut. Dengan demikian jumlah pendapatan dan belanja daerah dapat dijadikan indikator dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB).

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, penelitian terdahulu, hipotesis serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori yang diambil dari beberapa kutipan buku yang berupa pengertian dan definisi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran